

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menjadi problematika global dunia yang memiliki dampak signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. *The World Trade Organisation* (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020).

Penyebaran virus COVID-19 yang semakin merajalela dan tidak terkendali memaksa seluruh negara untuk memberlakukan kebijakan baru yaitu *lockdown*. Kebijakan ini merupakan pembatasan keseluruhan kegiatan masyarakat baik dalam urusan pendidikan, ekonomi maupun kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjadi larangan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia, kebijakan *lockdown* ini lebih dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang berlaku untuk seluruh kota yang ada di Indonesia.

Pemberlakuan kebijakan PSBB ini jelas melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat karena masyarakat dihimbau untuk tetap berada dirumah demi mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 hampir secara keseluruhan sektor ekonomi di Indonesia mengalami kemunduran tidak terkecuali pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

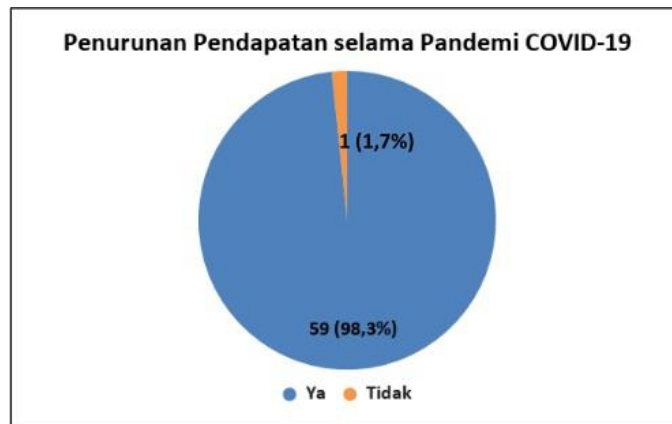
Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disebut sebagai UMKM merupakan salah satu bentuk dari pergerakan perekonomian produktif oleh masyarakat (Sari, 2020). UMKM juga merupakan salah satu bentuk dari gerakan perekonomian kerakyatan yang karenanya masyarakat diharapkan turut andil dalam perkembangan perekonomian terutama ditengah pandemi COVID-19 (Rahmawati dkk., 2021). UMKM itu sendiri tidak dapat diklasterisasikan hanya dalam satu jenis, melainkan terdapat beberapa perbedaan mendasar sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Timbulnya permasalahan UMKM secara nasional berimbas terhadap banyak daerah, salah satunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi DIY). Hal ini diperlihatkan dari dampak nyata pandemi yang dialami Provinsi DIY yakni kerugian pada sektor pariwisata sebesar 67,04 miliar pada bulan April 2020. Penurunan pendapatan UMKM sebesar 80%, sehingga menyebabkan 1.465 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah DIY (2020), pada tanggal 19 Oktober 2020 jumlah total penduduk terkonfirmasi positif COVID-19 di

Provinsi DIY adalah sebanyak 3.343 orang. Meskipun tidak termasuk daerah dengan jumlah terkonfirmasi penderita COVID-19 yang tinggi, dampak besar dialami Provinsi DIY dikarenakan sebagian besar sumber pendapatan daerah dan masyarakatnya adalah dari industri perekonomian melalui UMKM.

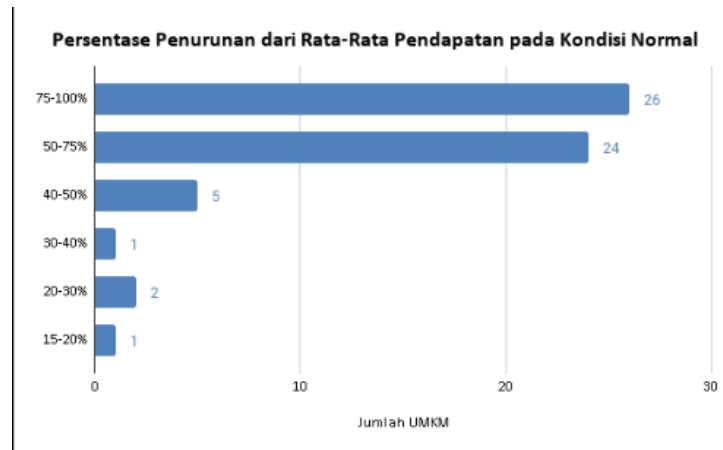
Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota dengan perkembangan UMKM yang baik, dimana sektor pariwisata menjadi salah satu komoditas andalan. Akibat pandemi Covid-29 sebanyak 59% UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta ikut terdampak langsung. Dampak yang paling dirasakan oleh sektor UMKM pariwisata adalah ditutupnya seluruh tempat wisata di DIY. Hal ini mengakibatkan sektor UMKM di DIY mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran dikarenakan tidak adanya pengunjung (Nugraha dan Edi, 2020). Menurut DPKM-UGM (2020) selama pandemi COVID-19, hampir seluruh responden (59 dari 60 UMKM) di DIY mengalami penurunan pendapatan dikarenakan daya beli konsumen yang menurun dan minimnya bahan baku. Berdasarkan grafik penurunan pendapatan, persentase penurunan pendapatan para pelaku UMKM kebanyakan mencapai 75- 100% dari rata-rata pendapatan pada kondisi normal.

Gambar 1. 1 Diagram Penurunan Pendapatan UMKM DIY



Sumber : DPKM-UGM (2020)

Gambar 1. 2 Persentase Penurunan Pendapatan UMKM DIY



Sumber : DPKM-UGM (2020)

Berdasarkan data yang ada permasalahan tersebut menyebabkan kerugian pada UMKM, sehingga mengharuskan adanya transformasi bisnis dari konvensional ke bisnis digital. Hal ini kemudian didukung dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Gubernur demi terciptanya aturan yang mengikat untuk memaksimalkan pemulihan UMKM di DIY.

SE tersebut dikeluarkan pada 14 Mei 2020 yaitu Surat Edaran Gubernur Nomor 519/7669 Tentang Himbauan Pembelian Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah DIY. SE Gubernur tersebut bertujuan

memulihkan kembali UMKM DIY yang sebelumnya *collapse* dengan melibatkan pemerintahan provinsi DIY beserta jajarannya untuk gesit dan responsif dalam mengimplementasikan SE tersebut agar terciptanya sebuah inovasi yang memberikan dampak positif bagi UMKM maupun masyarakat sekitar di tengah pandemi COVID-19.

Untuk mewujudkan inovasi yang aktif dan adaptif dalam organisasi publik yaitu dengan mengembangkan konsep *agile governance*. Gagasan tentang pemerintahan yang cerdas menurut Schiffers (1993) adalah penerapan sistem manajemen yang gesit dan responsif yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh banyak perusahaan swasta ke dalam manajemen pemerintah melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, penggunaan teknologi informasi, dan antisipasi lingkungan yang disruptif di berbagai sektor (Mergel dkk, 2018).

Dalam beberapa penelitian, *agile governance* dapat digambarkan dengan sistem implementasi manajemen pelayanan yang *agile* dan responsif. Sistem aplikasi manajemen layanan yang gesit dan responsif dapat diciptakan melalui struktur organisasi yang adaptif yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan mengantisipasi lingkungan yang disruptif di berbagai sektor (Schiffers, 1993). Oleh karena itu, pemerintahan yang *agile* menjadi kunci utama yang dibutuhkan di era disrupsi saat ini. Keberhasilan penerapan *agile governance* sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu daerah (Vernanda, 2020).

Oleh karena itu, Pemda DIY banyak melakukan inovasi terkait inovasi teknologi khususnya dalam pelayanan yang berbasis *e-Service*. *E-Service* merupakan transformasi layanan tradisional menuju layanan berbasis elektronik dengan tujuan menjadikan sistem pelayanan publik yang cepat, bersih, mudah diakses dan tidak bertele-tele. Dengan adanya pengimplementasian *e-Service* disuatu daerah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan publik akan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien (Napitupulu, 2018).

Salah satu usaha untuk mewujudkan *e-Service* untuk memaksimalkan pelayanan kepada UMKM adalah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Jogja (SiBakul Jogja). SiBakul Jogja merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha, sedangkan Jogja adalah kata populer dari wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. SiBakul Jogja adalah platform digitalisasi layanan urusan pemerintah di Dinas Koperasi dan UKM DIY melingkupi pembinaan Koperasi serta Usaha Mikro dan Menengah (KUMKM), pendataan dan inovasi fasilitas penguatan UKM (Ramadani, 2021) .

Tujuan dibentuknya SiBakul Jogja adalah membantu koperasi dan pemilik UMKM dalam menentukan langkah yang tepat dengan melakukan pembinaan untuk memajukan dan mengelola lembaganya dengan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, tujuan lainnya adalah menjaga keterbaruan, solidaritas, integritas serta akurasi data koperasi dan UMKM sehingga dapat membantu dalam memberikan gambaran yang tepat terkait postur kekuatan

koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menghadirkan tata kelola koperasi dan UMKM modern berbasis data yang valid untuk memenuhi kebutuhan dalam integrasi aplikasi, penyusunan kebijakan, dan kolaborasi dalam mengoptimalkan potensi koperasi dan UMKM DIY (Selvie Eliana,2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-Services* dari *agile governance* di lingkungan pemerintah daerah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam bentuk *platform* Sibakul Jogja bagi UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan *e-Services* untuk mewujudkan sistem layanan publik yang bersih, cepat, mudah diakses dan tidak bertele-tele. Selain itu tuntutan kebutuhan publik akan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien juga akan cepat tercapai melalui *e-Services* yang merupakan bagian dari *agile governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran SiBakul Jogja dalam membangkitkan UMKM dengan mengaplikasikan *e-Services* dalam penerapan *agile governance* di Provinsi Yogyakarta yang mengangkat studi kasus terkait implementasi penggunaan SiBakul Jogja. Aplikasi SiBakul menjadi objek penelitian karena aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang bagus, efektif serta efisien yang dibuat oleh Dinas UKM DIY. Aplikasi ini mampu untuk membantu para UMKM untuk lebih melek akan teknologi. Selain itu, penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian untuk memperoleh informasi terkait faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *e-Service* Pemerintahan DIY

dalam *agile governance*, yang diharapkan mampu memandu koperasi dan UMKM dalam menentukan cara modernisasi dalam pengelolaan dan memajukan lembaganya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yakni :

1. Bagaimana implementasi *e-Service* Pemerintah DIY dalam *Agile governance* pada aplikasi SiBakul?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Service* Pemerintah DIY dalam *Agile governance* pada aplikasi SiBakul.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-Services* dari *agile governance* di lingkungan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam bentuk platform Sibakul Jogja bagi UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *e-Service* Pemerintah DIY dalam *Agile governance* pada aplikasi SiBakul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca terutama bagi Ilmu Pemerintahan secara umum. Selanjutnya, hal mendasar lainnya adalah dikarenakan jurnal maupun artikel serta kajian mengenai *agile governance* masih

sangat minim karena masih asingnya pembahasan terkait inovasi *agile governance* di Indonesia.

2. Dapat memberikan referensi dalam mengetahui implementasi *e-Services* dari *agile governance* di lingkungan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam bentuk platform Sibakul Jogja bagi UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam hal perumusan inovasi yang pemerintah dapat implementasikan pada situasi pandemi COVID-19.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pihak terkait untuk selalu tanggap dalam menghadirkan sebuah inovasi terutama dalam hal pelayanan UMKM seperti aplikasi SiBakul Jogja.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

| NO | PENULIS | JUDUL | HASIL PENELITIAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Eka Putri Zulyani dan Geovani Meiwanda (2020) | <i>Agile governance</i> Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia | Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa di Indonesia perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>publik yang diberikan oleh ASN. Oleh sebab itu, kinerja serta nilai etika yang diberikan oleh seorang aparatur negara menentukan kualitas sistem pemerintahan dan juga kepuasan masyarakat. Brokrasi berkeleas dunia akan tercapai apabila Aparatur negara Aatau ASN sebagai aktor yang memberikan layanan juga berstandarkan berkelas dunia.</p> |
| 2. | Ralf-Martin Soe dan Wolfgang Drechsler (2017) | <i>Agile Local Governments: Experimentation Before Implementation</i> | Sebagai hasil dari studi kasus khusus ini, pemerintah kota dapat secara efektif meningkatkan layanan mobilitas desain mulai dari kualitas layanan dan pengurangan emisi CO2. |
| 3. | Farhan Rahmawan Halim, Feni Astuti, Khaerul Umam (2021) | Implementasi Prinsip <i>Agile governance</i> Melalui Aplikasi PIKOBAR di | Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi <i>agile governance</i> di Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Adapun alasannya adalah masih diperlukan perbaikan pada |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | Provinsi Jawa Barat | aplikasi Pilkobar agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah masa krisis pandemi. |
| 4. | Adella Intan Pertiwi (2021) | <i>Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises through SiBakul Jogja Free-Ongkir during COVID-19 (Case Study: Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Special Region of Yogyakarta</i> | Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak swasta belum terlaksana secara optimal. Terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi keberlangsungan kerjasama dalam pemberdayaan, seperti struktur jaringan yang sesuai dengan perannya, sumber daya yang telah menjadi tim yang baik dan dana yang memadai, serta kewenangan. Selanjutnya, adanya proses tata kelola kolaboratif berdampak pada pemberdayaan masyarakat. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5. | Dhea Shinta Prabandari dan Muhammad Eko Atmojo (2022) | Implementasi Platfrom Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta | Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa platform Sibakul membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya melalui bantuan digital, sekaligus memberi pelatihan dan pendampingan sebagai upaya dalam memperkuat kemampuan UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Adapun bebrapa kendala bagi Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai penyelenggara adalah terbatasnya SDM, masalah klasik pada pelaku UMKM, <i>Human Error</i> dan masalah teknis. |
| 6. | Ines Mergel dan Andrew B. Whitford (2021) | <i>Agile: A New Way of Governing</i> | Penelitian ini mengungkapkan bahwa penelitian empiris bersama dengan praktisi diperlukan untuk memahami harapan anggota organisasi, seperti kompetensi yang |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>diperlukan, struktur pengambilan keputusan, atau hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, tangkas adalah pola pikir yang memulai perubahan budaya dalam organisasi komando dan kontrol birokrasi. Administrasi tangkas terbuka untuk reformasi, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, nilai-nilai publik, dan kebutuhan publik.</p> |
| 7. | <p>Rulinawaty, Sofjan Aripin dan Lukman Samboteng (2020)</p> | <p><i>Talent Development & Excellence Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy Become Agile?</i></p> | <p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakmampuan birokrasi untuk gesit dalam merespon kompleksitas disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya dan tumpang tindih antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Adapun hasil penelitian ini adalah Indonesia perlu mengadopsi paradigma <i>agile</i> untuk bekerja lebih strategis, fleksibel, dan adaptif</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | terhadap perubahan yang menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang lebih baik. |
| 8. | Danar Ilham Kurniawan Akbar Maulana, S.IP.,M.Si dan Drs. Itok Wicaksono, M.Si (2021) | <i>Agile governance</i> Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah | Adapun hasil dari penelitian ini adalah Sistem E-Kinerja ini akan menciptakan sebuah ekosistem persaingan yang sehat dan positif pada tataran dinas antar dinas, bidang antar bidang pada dinas, serta individu antar individu dalam tujuan mendapatkan <i>reward</i> dan terus menggenjot program inovasi yang berguna bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor lainnya. Penerapan <i>Agile governance</i> di Kabupaten Banyuwangi selama ini terimplementasikan pada program <i>Smart City</i> . |
| 9. | Padmaningrum (2021) | Penyederhanaan Birokrasi Melalui <i>Agile governance</i> | Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlu ditumbuhkembangkan kemampuan diri dari tim |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | Menuju Layanan Prima | birokrasi agar responsif terhadap perubahan yang ada secara cepat dan sistematis. Birokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip <i>agile governance</i> , akan menjadi birokrasi yang sederhana, efektif dan efisien serta lincah. Efisiensi birokrasi dapat terlaksana dengan baik, diperlukan pengintegrasian ICT di sektor pemerintahan. Melalui <i>big data analytics</i> , birokrasi publik dapat membuat kebijakan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang ada. |
| 10. | Sadu Wasitiono dan Sulthon Rohmadin (2020) | Momentum Penataan Ulang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Era “ <i>New Normal</i> ” | Adapun hasil dari penelitian ini terinspirasi dari model <i>agile organization</i> yang dimodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang mencakup 6 (enam) aspek, yakni aspek strategi, aspek struktur, aspek proses, aspek masyarakat, aspek |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | teknologi dan aspek kepemimpinan. |
| 11. | Adi Hassan Ibrahim, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo Purnomo (2021) | <i>E-Services in Sudan During the COVID-19 Pandemic as a Model: a Case Study of University of Bahri-Sudan</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian <i>E-learning</i> akan secepatnya dilakukan di Sudan dengan beberapa tahapan yang dilakukan, seperti : diadakannya pelatihan intensif <i>E-skills</i> pada seluruh jajaran pemangku kepentingan, <i>support</i> yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, pemerataan internet dan jaringan listrik di wilayah Sudan, pengentasan kemiskinan dan memberikan stimulasi pada siswa untuk menerima <i>E-learning</i> . |
| 12. | (Mutiarin et al., 2019) Dyah Mutiarin, Yamira P | <i>The Adoption of Information and Communication Technologies in</i> | Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengembangan SDM sebagai sebuah konsep dapat dibentuk setidaknya dengan tiga |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | Moner dan Nuryakin (2019) | <i>Human Resource Management in the era of Public Governance</i> | faktor utama. Pertama, kegiatan yang didukung TIK telah memberikan dampak yang signifikan bagi pegawai dalam mengelola data dan catatan dengan lebih mudah dan menghemat biaya. Kedua, menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan saja tetapi juga sebagai mitra dalam proses pemerintahan. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama antar perusahaan maupun organisasi publik dalam upaya meningkatkan keterampilan, berbagi informasi serta keterampilan teknis terkait TI. |
| 13. | Lydia Aulia Kumara dan Dyah Mutiarin (2019) | <i>Generating the New Dimensions of Social Sustainability into Sustainable</i> | Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dukungan terhadap inklusi sosial masyarakat, pertumbuhan, kesetaraan sosial, stabilitas dan kesehatan sangat |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <p><i>Urban Development Policy</i></p> | <p>diperlukan dalam merepresentasikan dimensi berkelanjutan sosial yang luas dan saling berkaitan. Oleh karena itu, seharusnya dalam implementasinya hanya secara fungsi yang teintegrasi.</p> |
| 14. | <p>Wicaksono Febriantoro (2018)</p> | <p>Kajian Dan Strategi Pendukung Perkembangan E- Commerce Bagi Umkm Di Indonesia</p> | <p>Adapun hasil dari penelitian ini adalah banyak langkah yang dapat pemerintah lakukan dalam memperkuat sektor UMKM, salah satunya adalah dengan mangadopsi <i>e-commerce</i>. Faktor yang memperkuat adalah banyaknya pilihan bisnis <i>e-commerce</i> dan beragamnya produk yang dapat dijual dan menjadi langkah utama yang cukup bagus untuk memastikan seberapa besar peluang pasar dan dapat teroptimalkannya <i>urban life style</i> dengan baik. Sedangkan faktor kelemahanya adalah faktor</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | | kepercayaan masyarakat terkait keamanan transaksi menggunakan e-commerce. |
| 15. | Nikolaos A. Panayiotou dan Vasileios P. Stavrou Stavrou(2021) | <i>Government to business e-Services – A systematic literature review</i> | Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemerintah dapat mengidentifikasi di daerah mana mereka tertinggal dalam hal Layanan Elektronik G2B dengan ikut mempertimbangkan masa depan serta modernisasi. Selain itu bisnis, pertuaran informasi, infrastruktur juga akan dengan cepat berkembang mengikuti realitas zaman. Diperlukannya juga kerjasama yang baik antar stakeholder dalam pengembangan pemahaman bersama agar pengimplementasian <i>e-Services</i> dapat berhasil dan memiliki dampak yang substansial kepada masyarakat. |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2022)

Beberapa jurnal literatur diatas tentunya menjadi salah satu penilaian terkait penelitian *agile governance*. Di sisi lain perlu melakukan analisis terhadap bagaimana keterkaitan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain agar dapat membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai *agile governance* pada jurnal maupun artikel serta kajian masih sangat minim karena masih asingnya pemahaman terkait inovasi *agile governance* di Indonesia. Konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah dalam penerapan *agile governance* adalah pemerintah dari pusat hingga daerah harus mengimplementasikannya ke dalam sebuah program berkelanjutan. Salah satu program yang bisa diterapkan dan merupakan implementasi dari inovasi *agile governance* adalah *platform* Sibakul Jogja oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Sudah terdapat beberapa pembahasan kajian inovasi pemerintahan yang berkaitan dengan *agile governance* seperti Aplikasi Sibakul Jogja yang menjadi fokus utama penelitian ini diantaranya adalah Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) oleh Ramadhani dkk (2020) dan Aplikasi Jakarta Kini oleh Pratiwi (2021). Kedua aplikasi tersebut hanya berfokus membahas terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik secara elektronik bukan terkait upaya membangkitkan UMKM dengan melaksanakan desain *e-Services* model *agile governance*. Walaupun kedua inovasi diatas menjadi tolak ukur dari para peneliti tetapi keduanya masih sangat minim dalam

membahas keterkaitan inovasi tersebut dengan desain *e-Service* model *agile governance*.

Maka dari itu penelitian ini memiliki posisi yang konkrit bahwasanya pembahasan mengenai *e-Service* dengan model *agile governance* masih sangat minim dan juga kajian mengenai Sibakul Jogja yang merupakan salah satu inovasi yang pemerintah DIY ciptakan merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Selain untuk menambah khazanah analisis terkait *agile governance* tujuan lainnya adalah penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan kajiannya. Dengan adanya penelitian terkait “Implementasi *E-Service* Pemerintah DIY Dalam Meningkatkan UMKM Terhadap Model Pengembangan *Agile governance* Di Era New Normal pada aplikasi SiBakul Jogja” maka kebaruan dan argumen dari penelitian ini memiliki posisi yang konkrit dalam melanjutkan riset analisis terkait desain *e-Services* model *agile governance*.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah salah satu faktor pendukung dari sebuah penelitian, karena didalam kerangka teori ini akan dijelaskan teori-teori yang saling berhubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya kerangka teori ini akan digunakan sebagai acuan berfikir atau landasan teori dalam penelitian (Adellia, 2018).

1.6.1 *E-Service*

Layanan berbasis elektronik (*e-Service*) merupakan istilah yang umum digunakan, istilah ini mengacu pada layanan internet, sehingga

layanan elektronik termasuk ke dalam salah satu bentuk perdagangan internet, termasuk ke dalam layanan non-komersial (*online*) yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Definisi ini menggambarkan tiga komponen utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan (teknologi). Salah satu contohnya ialah sebagai pelaku layanan elektronik publik, badan publik berperan sebagai penyedia layanan dan masyarakat berperan sebagai penerima layanan. Internet merupakan pengaruh penting dari layanan elektronik yang berfungsi untuk telepon, *call center*, kios publik, televisi dan telepon genggam (Karim dan Khalid, 2003).

Pelayanan elektronik (*e-Service*) yang digunakan oleh lembaga publik sebagai upaya dalam menciptakan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkan berguna untuk memberikan kebermanfaat bagi masyarakat secara khusus dengan ditekannya potensi konflik antara tujuan eksternal dan internal sehingga diabaikan (Muh Fikram et al., 2019).

Kesimpulannya yaitu *e-Service* merupakan inovasi yang dibuat dengan menggabungkan antara fungsi pelayanan dan fungsi elektronik. *E-Service* merupakan langkah yang konkrit untuk mengatasi permasalahan yang hadir dalam pelayanan tradisional yang fasilitasnya dibatasi oleh perusahaan itu sendiri. Jika dilihat dari segi waktu, *e-Service* dapat lebih fleksibel diakses oleh pelanggan dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, *e-Service* mampu memudahkan perusahaan dalam memberikan respon yang

cepat. Meskipun untuk saat ini, perusahaan yang menggunakan layanan *e-Service* masih sangat minim (Karim dan Khalid, 2003).

Menurut Zeithaml dalam Tjiptono (2019) terdapat indikator-indikator dalam melaksanakan *e-Service* yaitu:

1. Efisiensi

Efisiensi dalam hal ini prinsip kemudahan dan kecepatan dalam melakukan akses pada aplikasi atau situs dengan tujuan mencari suatu produk atau informasi berkaitan. Efisiensi ini erat kaitannya dengan fungsi suatu aplikasi, dengan mengecek apakah suatu aplikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Reliabilitas

Reliabilitas dalam hal ini berkaitan dengan fungsionalitas teknis situs yang bersangkutan, terkhusus dalam hal sejauh mana situs tersebut tersedia dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan media sosial juga terlibat dalam fungsi teknis suatu situs dalam hal memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di era modern yang menuntut semua instrumen dapat mengakses segala sesuatunya melalui jejaring internet.

3. *Fullfilment*

Fullfilment dalam hal ini meliputi akurasi janji layanan, produk yang tersedia, dan pengiriman produk *ontime* dengan waktu yang dijanjikan. Berhubungan dengan fungsi teknis yang tersedia dan berfungsi dengan baik seperti memberikan layanan kepada masyarakat

dengan benar dan tepat waktu. Dalam melakukan pelayanan dibutuhkan kesamaan jadwal yang diberikan oleh staff pelayanan publik kepada masyarakat karena hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian apakah pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat atau tidak.

4. *Privacy*

Dalam hal ini *privacy* berkaitan dengan keamanan informasi dengan jaminan keaman data yang tidak akan tersebar. Adapun indikator keberhasilan *privacy* adalah dapat dipercaya terkait informasi dan data pribadi yang diperoleh. Keamanan data adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam mengurus data masyarakat karena dengan data yang aman akan menjadikan pelayanan publik tersebut dapat dipercaya.

1.6.2 *Agile governance*

Agile governance merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan cepat diikuti dengan kondisi perubahan kebutuhan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat. Konsep utama yang *agile governance* gunakan ialah kinerja aplikasi dan kerjasama tim. Kinerja aplikasi tersebut bekerja dengan meminimalisir dokumentasi. Kemudian kerjasama tim yang dimaksud adalah berupa dua orang programmer atau lebih yang berkerja dalam satu fitur dengan menjalin komunikasi intens antara programer dan klien (Rianto dkk 2022).

Agile governance merupakan iterasi atau perulangan yang tujuannya dapat secara cepat dalam merespon serta mengatasi setiap perubahan yang ada sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan suatu proyek dan mencapai kepuasan klien. Praktik *agile governance* ini cocok digunakan dalam proyek skala kecil sampai skala besar. Huang, Pan dan Ouyang (2014) mendefinisikan *agile governance* sebagai kemampuan suatu organisasi dalam mengefesiesikan anggaran yang ada dan membaca peluang dengan cepat dan tepat sehingga melahirkan tindakan yang inovatif dan kompetitif.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep *agile governance* menuntut pemerintah untuk gesit dalam menghadapi perkembangan era modern yang tidak terduga. Sehingga dalam menghadapi situasi tersebut pemerintah dapat beradaptasi serta dengan cepat mengeluarkan kebijakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi di negaranya masing-masing.

Adapun indikator-indikator dalam mengimplementasikan *agile governance* menurut Luna, Krutchen, dan Moura dalam Vernanda (2020) yaitu :

1. *Good enough government*

Good enough government ini berarti Tindakan ataupun tingkah dari pemerintah yang didasarkan pada suatu nilai dengan responsivitas yang tinggi kepada publik. Prinsip ini dapat dilihat dari bentuk

pelayanan dan inovasi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

2. *Business-driven*

Business-driven ini berarti dalam setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan bisnis. Dalam hal ini, pengembangan *agile governance* juga berpedoman dengan keuntungan nominal yang didapatkan oleh pelaku dalam *agile* yang dalam hal ini adalah publik itu sendiri.

3. *Human focused*

Human focused ini artinya masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan tata kelola pemerintahan serta mendengarkan setiap masukan yang ada.

4. *Systematic and adaptive approach*

Systematic and adaptive approach ini artinya pada perubahan yang cepat dan sistematis perlu sebuah tim yang dapat mengeksplorasi kemampuan mereka terutama dalam hal intrinsik.

5. *Simple design and continuous*

Simple design and continuous ini berarti sebuah tim harus memberikan capaian yang cepat dan terus meningkatkan capain kerjanya dalam hal membuat desaign.

1.6.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia pengertian UMKM telah termaktum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam UU UMKM menyebutkan bahwa :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 adalah sebuah usaha produktif yang kepemilikannya oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memiliki total maksimal kekayaan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penghasilan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Sedangkan Usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif yang berdidiri sendiri dan pelaku usahanya merupakan perorangan ataupun badan usaha yang berdiri merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, menjadi bagian atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah sampai usaha besar yang memiliki total maksimal kekayaan sejumlah lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan penghasilan tahunan sejumlah lebih dari 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai kuantitas tenaga kerja, usaha kecil adalah sebuah usaha yang jumlah tenaganya hanya berjumlah 5 sampai 19 orang, sedangkan untuk usaha menengah jumlah tenaga kerja yang dimiliki adalah 20 sampai 99 orang (*Industri Mikro Dan Kecil*, 2022).

Menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dengan Nomor 316/KMK 016/1994 pada tanggal 27 Juni 1994 dijelaskan bahwa usaha kecil sebagai perorangan ataupun badan usaha perorangan yang telah melakukan kegiatan ataupun usaha yang memiliki omset penjualan pertahun Rp.600.000.000 atau aset dengan nominal setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar bangunan dan tanah yang sedang ditempati).

Dalam perkembangannya, UMKM dapat diartikan sebagai sebuah kelompok usaha dengan jumlah besar. Selanjutnya kelompok usaha ini sudah dibuktikan dapat bertahan dari berbagai macam dinamika krisis ekonomi. Berdasarkan alasan tersebut maka sudah seharusnya pengembangan UMKM dapat melibatkan lebih banyak orang maupun kelompok (Azzahra dan Wibawa, 2021). Adapun klasifikasi UMKM sebagai berikut:

1. *Livelihood Activities* merupakan UMKM yang tujuan dibentuknya sebagai kesempatan kerja guna mencari nafkah atau biasa disebut sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang pelakunya memiliki sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah ada jiwa kewirausahaannya dan bisa melakukan pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan menjadi Usaha Besar (UB).

Selanjutnya menurut Budiarto (2019) terdapat indikator-indikator dari kinerja UMKM, yaitu :

1. Peningkatan pendapatan
2. Peningkatan jumlah pelanggan
3. Peningkatan kualitas produk
4. Peningkatan kualitas SDM

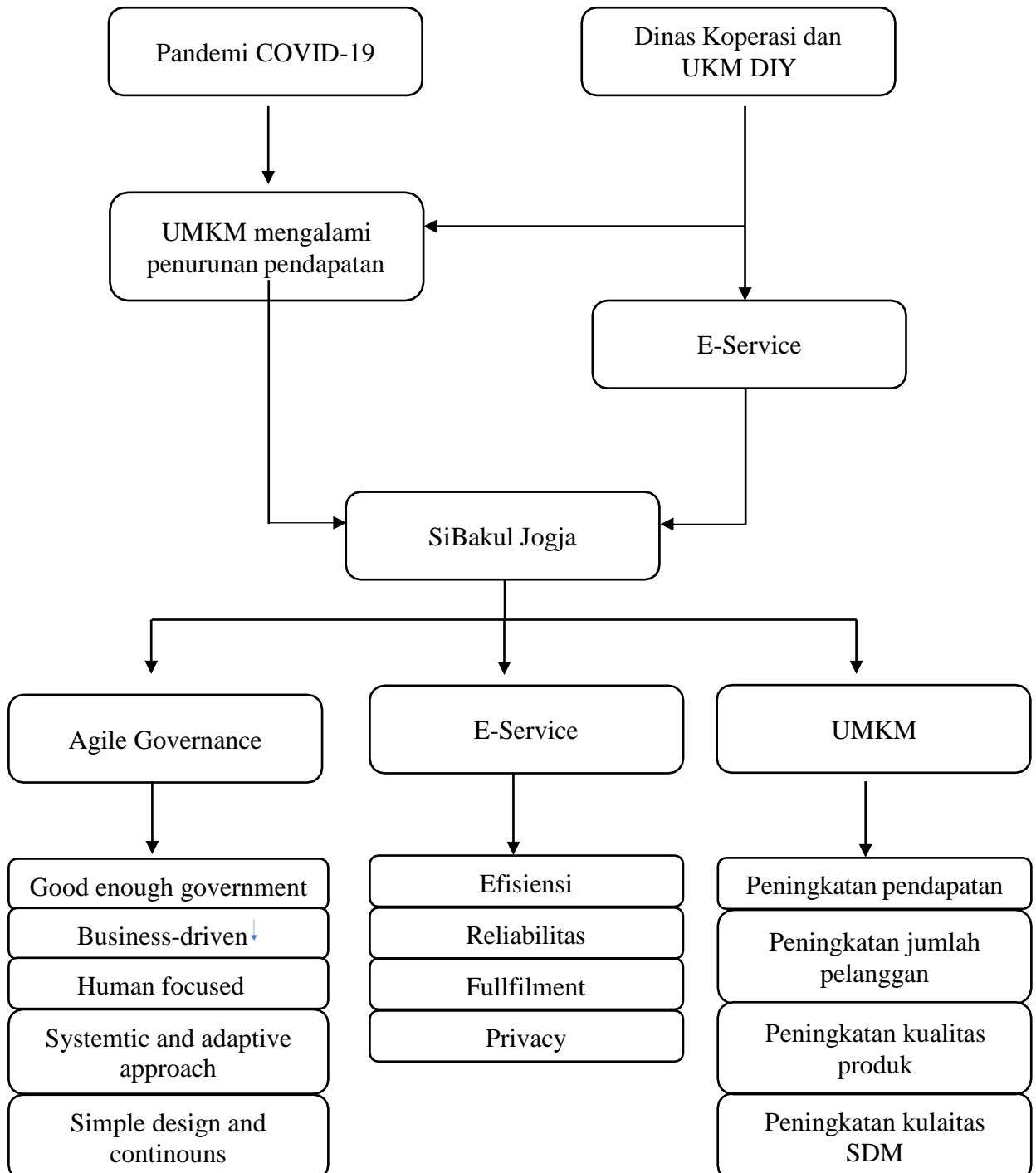
Dapat dilihat bahwa UMKM memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik negara-negara berkembang maupun negara maju. Di negara maju, UMKM menempati posisi yang sangat penting karena UMKM menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar yang ada di negara tersebut. Sedangkan, di negara berkembang kontribusi UMKM terhadap pembentukan serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sangat

besar dibandingkan kontribusi yang diberikan oleh usaha besar (Tambunan, 2012).

Pentingnya untuk memberikan penjagaan dan pengembangan UMKM yang terdapat di setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini dapat terus dilakukan dengan pemerintah melakukan pemberian kebijakan fasilitas modal yang dilakukan, pemasaran, peningkatan SDM dan Peningkatan teknologi informasi. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka UMKM akan dapat berkembang dengan baik dan secara otomatis akan memberikan penguatan nasional ekonomi di setiap negara (Budiarto, 2019).

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Alur Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Hadirnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia memberikan implikasi pada sektor ekonomi tepatnya pada UMKM. Timbulnya penurunan pendapatan UMKM secara nasional berimbas terhadap banyak daerah, salah satunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi DIY). Karena permasalahan tersebut menyebabkan kerugian pada UMKM maka Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan transformasi bisnis dari konvensional ke bisnis digital dengan mengimplementasikan *e-Service*.

Salah satu usaha untuk mewujudkan *e-Service* untuk memaksimalkan pelayanan kepada UMKM adalah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Jogja (Sibakul Jogja). Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu : *agile governance*, *e-Services*, dan UMKM. Pada variabel *agile governance* terdapat beberapa indikator yaitu *good enough government*, *business-driven*, *human focused*, *systematic and adaptive approach*, dan *simple design and continuous*.

Kemudian pada variabel *e-Service* terdapat empat indikator dalam pelaksanaannya yaitu efisiensi, realibilitas, *fulfilment* dan *privacy*. Dan yang terakhir adalah indikator-indikator yang mempengaruhi pelaksanaan UMKM adalah peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas produk dan peningkatan kualitas SDM.

1.8 Definisi Konseptual

1.8.1 Agile governance

Menurut M. Holmqvist dan K. Pessi dalam Abiyyu (2021) *agile governance* adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi dalam bergerak cepat dalam merespon perubahan tidak terduga di era modern dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan layanan publik masyarakat yang semakin meningkat. Dalam pembahasan ini, konsep *agile governance* hadir sebagai opsi birokrasi pada sebuah paradigma organisasi baru. Selain itu, *agile governance* juga menuntut pemerintah untuk dapat mengelola organisasi secara gesit guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas organisasi. Dalam penerapan konsep *agile governance*, pemanfaatan TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mengeksplorasi lingkungan yang cepat berubah.

1.8.2 UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro

Usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang kepemilikannya oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tercantum di UU tersebut.

2. Usaha kecil

Usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan pelaku usahanya merupakan perorangan ataupun badan usaha yang berdiri merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, menjadi bagian atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah sampai usaha besar yang memiliki kriteria tercantum di UU tersebut.

3. Usaha menengah

Usaha menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta kepemilikannya oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha yang dimiliki dan dikuasai ataupun sudah menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak dengan kriteria yang sudah tercantum di UU tersebut.

1.8.3 E-Service

Layanan berbasis elektronik (*e-Service*) merupakan istilah yang umum digunakan, istilah ini mengacu pada layanan internet, sehingga layanan elektronik termasuk ke dalam salah satu bentuk perdagangan internet, termasuk ke dalam layanan non-komersial (*online*) yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Definisi ini menggambarkan tiga komponen utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan (teknologi). Salah satu contohnya ialah sebagai pelaku layanan elektronik publik, badan publik berperan sebagai penyedia layanan dan masyarakat berperan sebagai penerima layanan. Internet merupakan pengaruh penting

dari layanan elektronik yang berfungsi untuk telepon, *call center*, kios publik, televisi dan telepon genggam (Karim dan Khalid, 2003).

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara mengartikan variabel secara operasional menurut karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti dapat melakukan observasi atau pengamatan secara rinci terhadap suatu objek. Proses mengartikan variabel berarti menggambarkan variabel sedemikian rupa hingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna. Jika sampai variabel tersebut memiliki makna ganda maka akan membuat variabel tersebut bias dan berpengaruh pada penelitian yang ada (Nurdin dan Hartati, 2019).

Tabel 1. 2 Variabel, Indikator dan Parameter Penelitian

| Variabel | Indikator | Parameter |
|-------------------------|---|--|
| <i>Agile governance</i> | <i>Good enough government</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk menciptakan pemerintahan yang responsif. b. Penggunaan aplikasi Sibakul Jogja untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. |
| | <i>Business-driven</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan pada kebutuhan bisnis. b. Bisnis yang dilakukan dipicu oleh perkembangan teknologi. |
| | <i>Human focused</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan <i>agile governance</i> di Dinas Koperasi dan UKM DIY. b. Pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat. |
| | <i>Systematic and adaptive approach</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam merespon percepatan teknologi. b. Kemampuan Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| | <i>Simple design and continouns</i> | a. Desain Tata Kelola Pemerintahan yang cepat dan berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui aplikasi SiBakul. |
| Implementasi <i>E-Service</i> | Efisiensi | Kemudahan dan kecepatan dalam melakukan akses pada aplikasi SiBakul Jogja. |
| | Reliabilitas | Fungsi dan manfaat dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi SiBakul Jogja sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
| | <i>Fullfilment</i> | Akurasi layanan, produk yang tersedia, dan pengiriman produk <i>ontime</i> dengan waktu yang dijanjikan pada aplikasi SiBakul Jogja. |
| | <i>Privacy</i> | Tingkat keamanan terkait informasi pribadi pengguna aplikasi Sibakul. |
| UMKM | Peningkatan pendapatan | Memberikan peningkatan pendapatan kepada UMKM yang tergabung dalam aplikasi SiBakul Jogja. |
| | Peningkatan jumlah pelanggan | Memberikan peningkatan jumlah pelanggan kepada UMKM yang tergabung dalam aplikasi SiBakul Jogja. |
| | Peningkatan kualitas produk | Memberikan peningkatan kualitas produk kepada UMKM yang tergabung dalam aplikasi SiBakul Jogja |
| | Peningkatan kualitas SDM | Memberikan peningkatan kualitas SDM kepada UMKM yang tergabung dalam aplikasi SiBakul Jogja. |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis dengan tujuan tertentu untuk menjawab masalah yang menjadi objek penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebuah penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang makna dan

perspektif, pengalaman, dan paling sering pendapat penulis (Hammarberg dkk 2016).

Selain itu, Ahmad Rijali (2019) mengungkapkan bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif, bentuk dari konseptualisasi, kategori, hingga deskripsi kegiatan dikembangkan dan dielaborasi berdasarkan pada kejadian yang diperoleh di lapangan. Sehingga, antara kegiatan dalam pengumpulan data maupun analisis data tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua proses ini berlangsung secara simultan.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM DIY pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan dinas inilah yang berkepentingan dalam menciptakan serta mengelola aplikasi SiBakul Jogja. Dinas Koperasi dan UKM DIY pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jalan Janti, Kecamatan Banguntapan, Modalan, Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari narasumber secara langsung dalam hal ini adalah pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kemudian untuk data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan dari beberapa literatur seperti jurnal tentang kemiskinan di jogja, SDGs, ketahanan sosial, website Dinas Koperasi dan

UKM DIY, ataupun aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder digunakan untuk menekankan pada sumber data yang ada dengan menghasilkan data baru. Sehingga, penulis dapat mengeksplorasi data dari sudut pandang yang berbeda dengan melakukan verifikasi, sanggahan, dan penyempurnaan. Data sekunder akan digunakan untuk memperjelas masalah penelitian berdasarkan pada pengalaman yang serupa dengan penelitian.

Tabel 1. 3 Rincian Data Sekunder

| No. | Nama Data | Sumber Data |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | Pelatihan SiBakul Jogja | Website Sibakul Jogja (Sibakuljogja.jogja.jogjaprov.go.id), |
| 2. | Informasi kegiatan | Instagram (Sibakul_Jogja), Instagram (diskopukm.diy), Twitter (@DIYUKM), Youtube (Dinas Koperasi dan UKM DIY), |
| 3. | Rekap Data UMKM | Laporan Tahunan Sibakul Jogja |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data nantinya akan membantu untuk melakukan analisis dan akurasi dari penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah

data primer yang nantinya diperoleh dari beberapa narasumber di Dinas Koperasi dan UKM DIY pemerintah DIY. Adapun data yang diperoleh nantinya akan diolah dengan menggunakan Nvivo 12 Plus untuk melakukan analisis data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar dua belah pihak yakni antara narasumber dan wartawan atau dalam hal ini adalah penulis. Terdapat banyak jenis wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan pendekatan yang menggunakan petunjuk umum. Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik *Indepth Interview*.

Jenis wawancara ini memberikan pewawancara sebelumnya telah memiliki kerangka ataupun garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan secara berurutan (Anggito dan Setiawan, 2018). Sehingga, nanti peneliti telah menyusun poin besar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk dijawab. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menggali lebih banyak informasi dari responden sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Mekanisme yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan surat persetujuan wawancara, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan secara runtut kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.4 Daftar Narasumber

| No. | Narasumber | Instansi/Jabatan |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Hana Fais Prabowo, S.T.P., M.Si. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY |
| 2. | Wahyu Tri Atmojo, S.Pd. | Konsultas Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah DIY (PLUT- KUMKM DIY) |
| 3. | Lista Rantika | Konsultan PLUT DIY |
| 4. | Yudi Wahyudi | Konsultan ITE Dinas Koperasi dan UKM DIY |
| 5. | Endah Febriasih | Penelaah Pengembangan Usaha |
| 6. | Wulan | Pemilik Djfrms |
| 7. | Wisnu Nugroho | Pemilik 6 Miles Coffe |
| 8. | Vitalia Nur Darmaningsih | Pemilik Rumah Batik Jinggar |
| 9. | Lusi Ekawati | Pemilik Benang Lusi |
| 10. | Didin Jamaludin | Pemilik Ekoprint.id |
| 11. | Herdiana Dewi Utari | Pemilik CV Dewi Makmur |
| 12. | Hanum Wahyu Wibisono | Pemilik CV Khaira Buana Mas |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

2. Dokumentasi

Teknik data pertama yang digunakan adalah teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi ini merupakan salah satu cara untuk

mengumpulkan data melalui arsip, buku, teori, argumen, ataupun hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian (Al-Hamdi dkk 2020). Dalam penelitian ini, arsip yang digunakan dapat berasal dari arsip Dinas Koperasi dan UKM DIY, individu dalam tulisan ataupun gambar dari seseorang. Kemudian, dokumen yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah lebih lanjut untuk menjadi data pendukung pada penelitian ini.

3. Ncapture

Ncapture merupakan salah satu fitur yang tersedia di google chrome yang berguna untuk pengolahan informasi dalam mendapatkan data dari platform internet seperti website atau sosial media (twitter, facebook, Instagram atau portal berita online). Ncapture terlebih dahulu di download pada google chrome dan nantinya digunakan untuk mengimpor data dari media sosial ataupun website untuk lebih lanjut dimasukkan dan diolah pada Nvivo 12 Plus.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menyatukan hasil dari pengumpulan data yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian, dan mengambil kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data menjadi hal utama instrumen untuk melihat objektivitas suatu data. Analisis data dalam hal ini merupakan proses untuk menemukan dan menyusun hasil wawancara, catatan yang diperoleh dalam lapangan

ataupun dari berbagai sumber yang selanjutnya akan diakumulasikan untuk mengkonstruksi menjadi informasi yang penting (Rijali, 2019).

Kemudian dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan tentang objek penelitian dan menjadi penguat data dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah aplikasi Nvivo 12 Plus. Analisis data dilakukan secara linier mulai dari pengumpulan data hingga temuan akhir. Dengan demikian, konsep, kategorisasi, dan deskripsi harus dikembangkan berdasarkan peristiwa yang telah diperoleh di lapangan. Adapun Langkah dalam analisis data ini yakni :

1. Reduksi Data

Saat melakukan pengumpulan data akan diperoleh data yang sangat banyak, sehingga perlu pencatatan secara rinci dan teliti. Peneliti akan mereduksi data (merangkum), memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari pola dan temanya. Pada saat mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai sehingga tujuan utamanya adalah pada temuan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah peneliti selanjutnya akan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan lain- lain. Dengan adanya penyajian, maka akan terbentuk pola hubungan. Setelah menemukan pola hubungan maka dianalisis

secara mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah dilakukan penyajian data, maka kegiatan akhir adalah menyimpulkan dan melakukan uji verifikasi yang dimaksudkan dengan pengecekan data-data yang telah ditampilkan apakah memenuhi standar keabsahan data atau tidak. Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan ini maka nantinya dari tiga analisis tersebut akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Setelah itu akan didapatkan kesimpulan sementara dan kemudian akan dipadukan dengan temuan di lapangan. Dengan melakukan proses tersebut maka data yang diperoleh dari lapangan dapat lebih valid dan terjamin (Sugiyono, 2016).

Oleh karena itu, hasil penelitian yang didapatkan kemudian disesuaikan kembali dengan reduksi dan penyajian data yang dapat disepakati sebagai laporan tertulis ilmiah serta memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam analisis data adalah Nvivo 12 plus. Penggunaan *software* Nvivo membantu dalam proses reduksi data dan penyajian hasil pengkodean yang dapat berupa grafik, diagram, pola, data audio, dan video.

Sehingga dalam menganalisis hasil wawancara dapat dilakukan transkrip, mengoreksi dan menganalisis hasil tes, serta dapat mengembangkan konsep teoritis yang sumbernya berasal dari data yang

telah diperoleh dan ada sebelumnya (Bandur, 2019). Adapun beberapa fitur yang digunakan dalam aplikasi Nvivo 12 plus diantaranya :

1. *Crosstab Query*

Crosstab query merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui variabel penelitian yang mempengaruhi objek atau fokus penelitian penelitian dengan hasil menampilkan persentase angka, grafik, dan kesimpulan (Hai-Jew, 2020).

2. *Cluster Analysis*

Tujuan dari analisis klaster di Nvivo adalah untuk mengeksplorasi korelasi antara satu teks dengan teks lainnya. Analisis klaster adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan file, node, dokumen yang memiliki nilai yang sama sehingga peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan berdasarkan jarak. Hasil analisis cluster dapat digunakan untuk memvisualisasikan: persamaan dan perbedaan di seluruh file, persamaan, dan perbedaan di seluruh node file (Ozkan, 2004). Dalam *cluster analysis* yang digunakan diantaranya adalah *Pearson correlation coefficient*, *Jaccard's coefficient*, dan *Sorensen's coefficient* (Jackson & Bazeley, 2019).

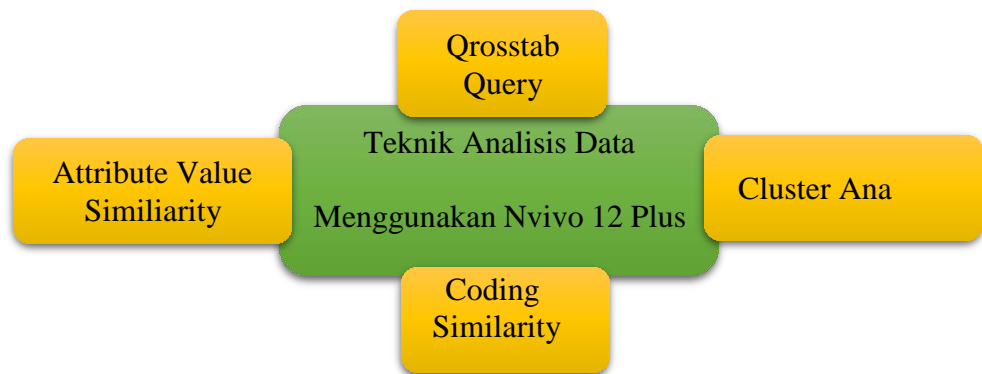
3. *Coding Similarity*

Coding similarity adalah membandingkan hasil pengkodean antara file dan node. File atau node yang telah dikodekan dikelompokkan berdasarkan nilai tinggi dan rendah nilai-nilai. Hasil dari nilai-nilai ini dapat ditampilkan dalam cluster (Hai-Jew, 2020).

4. *Attribute Value Similarity*

Attribute Value Similarity adalah analisis yang membandingkan nilai atribut file atau node file. File atau node file dengan nilai atribut tinggi adalah grup dalam diagram analisis kluster, sedangkan file atau node dengan nilai lebih rendah dikelompokkan lebih lanjut dalam analisis kluster (Jackson dan Bazeley, 2019).

Gambar 1. 4 Teknik Analisis Data Menggunakan Nvivo 12 Plus



Sumber : Diolah oleh penulis

